

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi persaingan usaha yang kompetitif perusahaan berusaha memperbaiki kinerja dan mengembangkan usaha untuk mengembangkan perusahaan. Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Memaksimalkan nilai perusahaan bermakna luas dari memaksimalkan laba, didasarkan beberapa alasan yaitu memaksimalkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang, memaksimalkan nilai juga berarti mempertimbangkan berbagai resiko terhadap arus pendapatan perusahaan dan mutu dari arus dana yang diharapkan diterima dimasa yang akan datang (Weston & Copeland, 1995; 134 *dalam* Nur'aeni, 2010).

Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini merupakan salah satu tempat transaksi perdagangan saham dari berbagai jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Ada beberapa jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu perusahaan keuangan, pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti dan infrastruktur. Perusahaan keuangan adalah salah satu perusahaan yang ikut berperan dalam pasar modal. Perusahaan keuangan terbagi menjadi beberapa kategori yaitu perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi dan lainnya (www.sahamok.com).

Perkembangan perekonomian dalam dunia bisnis sangat cepat dan semakin kuat, mengakibatkan adanya tuntutan bagi perusahaan untuk terus melakukan berbagai macam inovasi untuk memperbaiki kinerja dan memperluas usaha perusahaan supaya mampu bersaing dan bertahan di dalam dunia bisnis. Untuk tetap bertahan, setiap perusahaan diwajibkan menerapkan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang baik untuk bisa bersaing maupun bertahan dalam persaingan bisnis dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang (Nizamullah, 2014).

Kinerja perusahaan merupakan salah satu ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dalam perusahaan. Ukuran kinerja perusahaan yang baik diawali dengan adanya kepercayaan dari investor terhadap suatu perusahaan bahwa dana yang mereka investasikan dalam kondisi yang aman dan diharapkan akan memberikan return yang baik pula. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara lain di Asia pada pertengahan tahun 1997 diidentifikasi terkait dengan buruknya kinerja perusahaan dan rendahnya daya saing perusahaan-perusahaan di negara tersebut serta lemahnya proteksi terhadap investor (Setiawan, dkk., 2005 dalam Pratiwi, 2010). Lemahnya *corporate governance* ditandai dengan adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan para investor, sehingga menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan.

Jika tahun 2008 terdapat skandal keuangan perusahaan besar di dunia seperti Lehman Brothers dan Goldman Sachs, maka tahun 2012 terjadi skandal yang melanda lembaga keuangan seperti JP Morgan, Barclays, UBS, dan lain sebagainya. Kasus

skandal tersebut memperlihatkan bukti bahwa adanya kinerja perusahaan yang buruk yang dikarenakan kurangnya proteksi terhadap investor serta tidak adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan, sehinggadapat terjadi asimetri informasi antara pihak principal dan agent yang menggambarkan adanya pihak yang dapat menggelapkan dana yang telah diinvestasikan oleh investor tersebut (Lestari, 2013).

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan kinerja perusahaan. Isu mengenai *corporate governance* mengemuka di Indonesia pada tahun 1998 di saat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan. Banyak pihak seperti pengamat ekonomi, investor, dan kalangan akademisi yang mengatakan bahwa lamanya proses pemulihan dari krisis ini disebabkan sangat lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah dan investor mulai memberikan perhatian yang signifikan terhadap GCG. Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian atas investasi yang telah mereka tanamkan (Rossi dan Panggabean, 2012).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya penerapan *corporate governance* yang bervariasi antar satu negara dengan negara lain. Pada dasarnya penelitian-penelitian tersebut menunjukkan terdapatnya perbedaan sistem hukum yang melindungi investor antar negara (La Porta, 2000 dalam Sabrina, 2010). *Good*

corporate governance dibutuhkan perusahaan go publik untuk mengelola *corporate governance* yang baik. Perusahaan publik akan memiliki dana yang lebih besar dari hasil penjualan sahamnya kepada masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan *good corporate governance* membutuhkan pihak-pihak atau kelompok yang mengawasi implementasi kebijakan direksi, sehingga dewan komisaris merupakan bagian pokok dari mekanisme *corporate governance*.

Sesuai dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep/BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan bahwa untuk mencapai *good corporate governance*, jumlah komisaris independen yang harus ada dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan pembentukan dewan komisaris independen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan. Dewan komisaris independen bertugas untuk memastikan adanya *Good Corporate Governance* dengan memberikan masukan serta pengawasan kepada Dewan direksi untuk kepentingan perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan GCG dengan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan diantaranya Dewayanto (2010) dalam Nizamullah, dkk (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan nasional yang terdaftar pada BEI. Penelitian Purnamasari (2012) dalam Nizamullah, dkk (2014) menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian Ristifani (2009)

menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akan tetapi, penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan GCG yang diukur dengan nilai komposit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

Dewan komisaris adalah dewan yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip GCG, keputusan yang diambil oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi secara objektif. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan komisaris independen tidak menjalankan fungsinya dengan baik yang diakibatkan masih adanya hubungan afiliasi antar dewan komisaris sehingga kinerja dewan komisaris menjadi tidak independen.

Komite audit berperan untuk melakukan pengawasan internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit juga memiliki fungsi untuk menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan eksternal. Adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan

yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi. Kurangnya pengawasan dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit menyebabkan *good corporate governance* tidak berjalan secara optimal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi keputusan manajer dan akan berakibat pada kinerja keuangan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ningsaptiti *dalam* Zeptian (2013), perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Perusahaan yang lebih besar dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk kepentingan investasi, karena perusahaan yang besar akan lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga dalam melakukan pelaporan akan lebih hati-hati. Perusahaan-perusahaan yang berukuran besar juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan besar juga akan membawa pengaruh yang besar pula terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar akan membuat manajer lebih hati-hati dalam melaporkan kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi

Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016) “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif komite audit terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *good*

corporate governance, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

b. Bagi Penelitian yang akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh penerapan *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.